

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partai Politik dalam Sistem Politik

2.1.1 Definisi Partai Politik

Menurut Edmund Burke, partai politik adalah sebuah lembaga yang terdiri dari individu-individu yang bersatu dengan tujuan untuk memajukan kepentingan nasional secara kolektif, berdasarkan prinsip-prinsip dan kesepakatan bersama. Burke menekankan bahwa kesatuan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang disetujui oleh anggota partai, sehingga memungkinkan partai politik untuk memiliki kekuatan kolektif yang lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan dan arah pemerintahan. Dalam pandangan Burke, partai politik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional melalui kerjasama dan kesatuan visi di antara anggotanya (Feldman, 1987).

Selaras dengan pandangan Burke, Lapalombara dan Anderson (1992) mendefinisikan partai politik sebagai kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi, yang berfungsi sebagai penghubung antara pusat kekuasaan dan lokalitas. Mereka menekankan bahwa partai politik harus terlibat dalam pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat dalam posisi publik melalui proses pemilihan, baik dalam konteks pemilu yang bebas maupun tidak bebas. Definisi ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi pada tingkat nasional tetapi juga harus mampu menjangkau dan berinteraksi dengan masyarakat lokal, memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dalam berbagai konteks pemilu.

Lebih lanjut, menurut Sigmund Neuman, partai politik adalah organisasi yang terdiri dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta memperoleh dukungan rakyat melalui persaingan dengan kelompok atau golongan lain yang memiliki pandangan berbeda. Neuman menyoroti aspek persaingan politik dan dukungan publik sebagai elemen penting dalam fungsi partai politik, menunjukkan bahwa partai politik beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif di mana mereka harus bersaing untuk memenangkan dukungan dan legitimasi dari masyarakat (Neumann, 1963).

Sementara itu, R.H. Soltau menggambarkan partai politik sebagai sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memilih dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum mereka. Soltau menekankan peran partai politik dalam pengorganisasian warga negara dan penguasaan pemerintahan, menunjukkan bahwa partai politik adalah mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk bersatu dan menggunakan kekuasaan politik mereka secara efektif dalam proses pemerintahan (Soltau, 1961).

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dengan tujuan utama untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Untuk merealisasikan tujuan ini, partai politik harus memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat melalui pemilihan umum. Selain itu, partai politik beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh anggotanya, yang menjadi dasar bagi kesatuan dan kekuatan kolektif dalam mempengaruhi kebijakan dan arah pemerintahan.

Carl J. Friedrich menyatakan bahwa partai politik adalah sekelompok individu yang terorganisir secara stabil, dengan tujuan untuk menciptakan atau mempertahankan penguasaan atas pemerintahan bagi pimpinan partainya. Berdasarkan penguasaan ini, partai politik memberikan manfaat ideal ataupun material kepada anggotanya. Friedrich menyoroti stabilitas organisasi dan tujuan partai dalam mempertahankan kekuasaan serta memberikan manfaat kepada anggota partainya. Dengan demikian, berbagai definisi ini menunjukkan bahwa partai politik berfungsi sebagai organisasi yang berusaha menguasai dan mempertahankan kekuasaan pemerintah melalui berbagai cara, termasuk pemilihan umum, persaingan politik, dan pemberian manfaat kepada anggotanya. Partai politik tidak hanya bertujuan untuk memajukan kepentingan nasional tetapi juga untuk mengorganisir warga negara dan memastikan stabilitas serta kontinuitas kekuasaan bagi pemimpinnya (Friedrich, 1967).

2.1.2 Fungsi Partai Politik

Menurut Hikmat. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari partai politik (2019):

1. Sarana Komunikasi Politik: Partai politik berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka menyalurkan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah serta menginformasikan kebijakan dan keputusan pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian, partai politik menjadi sarana utama dalam menyampaikan pandangan dan kebijakan publik, serta mempengaruhi opini publik.

2. Sarana Sosialisasi Politik: Melalui partai politik, masyarakat diajarkan tentang nilai-nilai, norma, dan aturan yang ada dalam sistem politik suatu negara. Sosialisasi politik ini mencakup pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam proses politik. Partai politik membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memotivasi mereka untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi.
3. Sarana Rekrutmen Politik: Partai politik berperan dalam merekrut dan melatih calon-calon pemimpin politik. Mereka mencari individu yang memiliki kemampuan dan minat dalam politik untuk bergabung dan berkontribusi dalam partai. Rekrutmen ini mencakup proses seleksi untuk kandidat yang akan maju dalam pemilihan umum serta memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan politik untuk para anggotanya.
4. Sarana Pengatur Konflik (*Conflict Management*): Partai politik memainkan peran penting dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat. Dengan memiliki struktur dan mekanisme yang terorganisir, partai politik dapat berfungsi sebagai mediator yang menengahi konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Mereka membantu mencari solusi yang damai dan adil, serta mengurangi potensi ketegangan dan kekerasan. Dalam konteks ini, partai politik juga berperan dalam menjaga stabilitas politik dan sosial di negara tersebut.

2.1.3 Peran Partai Politik

Partai politik memegang peran sentral dalam sistem politik demokratis, terutama sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Melalui keberadaannya, partai politik tidak hanya menjadi kendaraan elektoral bagi calon legislatif dan eksekutif, tetapi juga berperan dalam memperkuat fondasi demokrasi secara substantif. Supriatno dan Rozi (2025) menjelaskan bahwa partai politik memengaruhi kualitas demokrasi melalui fungsi-fungsi utama seperti rekrutmen politik, mobilisasi partisipasi pemilih, serta keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik selama pemilu (Yehezkiela & Takalamingan, 2023). Proses rekrutmen ini mencakup seleksi kader untuk menduduki jabatan publik dan pelibatan masyarakat dalam pendidikan politik, yang pada akhirnya akan menentukan arah kepemimpinan nasional maupun lokal secara lebih partisipatif dan representatif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan lima fungsi pokok partai politik: (1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, (2) penciptaan iklim demokratis yang damai, (3) penyerapan dan penyaluran aspirasi politik rakyat, (4) partisipasi dalam pemilu, serta (5) peran sebagai perekat persatuan nasional (Yehezkiela & Takalamingan, 2023). Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya berperan dalam kontestasi kekuasaan, melainkan juga sebagai institusi sosial-politik yang menjalankan peran edukatif dan integratif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, partai bertanggung jawab untuk membina pemahaman politik warga, menjembatani antara aspirasi

rakyat dan kebijakan negara, serta menjaga kohesi sosial dalam sistem politik yang pluralistik.

Penegasan terhadap pentingnya peran partai juga dikemukakan oleh Yehezkiel dan Takalamingan (2023), yang menyatakan bahwa partai politik merupakan agen sosialisasi politik dan penjaga stabilitas demokrasi, terutama di tengah dinamika politik yang fluktuatif dan cepat berubah (Yehezkiela & Takalamingan, 2023). Selain itu, Khotimah (dalam Yehezkiela & Takalamingan, 2023). menambahkan bahwa eksistensi partai politik merupakan bentuk pelembagaan demokrasi itu sendiri; tanpa kehadiran partai yang kuat dan terorganisir, maka sistem demokrasi akan kehilangan instrumen institusional yang mampu mengelola aspirasi publik secara sistematis (Palka Research, 2025). Partai juga berperan penting dalam menjaring dan menyalurkan kepentingan masyarakat secara institusional, mencegah fragmentasi politik yang eksekutif, serta menjadi saluran utama rekrutmen kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan kinerja partai politik merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Semakin efektif partai menjalankan fungsi rekrutmen, edukasi politik, dan konsolidasi aspirasi, maka semakin tinggi pula kualitas representasi dan kepercayaan publik terhadap proses politik yang dijalankan.

2.1.4 Kedudukan Partai Dalam Demokrasi

Dalam sistem politik demokratis, partai politik menempati posisi yang sangat strategis sebagai salah satu pilar utama dalam menopang keberlangsungan

demokrasi. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai peserta pemilu, melainkan juga sebagai institusi yang berperan aktif dalam membentuk arah kebijakan negara dan menjaga kesinambungan pemerintahan. Mair (dalam Yehezkiel & Takalamingan, 2023) menyebut partai politik sebagai “anak kandung demokrasi” karena kemunculan dan perkembangannya erat kaitannya dengan kebutuhan representasi rakyat dalam sistem politik yang terbuka dan partisipatif. Kedudukan sentral ini tercermin dari peran partai politik sebagai penghubung utama antara warga negara dan institusi pemerintahan. Melalui partai, aspirasi politik masyarakat dikumpulkan, disaring, dan disalurkan secara sistematis ke dalam proses pembuatan kebijakan publik (Yehezkiel & Takalamingan, 2023). Dengan demikian, partai berfungsi sebagai mekanisme artikulasi dan agregasi kepentingan yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan lembaga-lembaga negara.

Fungsi representatif tersebut diperkuat oleh amanat konstitusional dan kerangka regulasi yang mengatur partai politik di Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di dalamnya, ditegaskan bahwa partai memiliki tugas tidak hanya untuk mencalonkan kandidat dalam pemilu, tetapi juga untuk melaksanakan pendidikan politik dan menyerap aspirasi masyarakat secara berkelanjutan. Sebagai aktor utama dalam sistem demokrasi, partai politik juga bertanggung jawab menjaga sirkulasi kekuasaan melalui mekanisme yang damai, teratur, dan sah secara konstitusional. Dengan kata lain, keberadaan partai politik memungkinkan proses pergantian kepemimpinan dilakukan secara legal dan tidak destruktif, sehingga stabilitas politik dan pemerintahan dapat terjaga.

Studi oleh Khotimah (dalam Yehezkiela & Takalamingan, 2023) menguatkan pandangan ini dengan menegaskan bahwa keberadaan partai politik merupakan prasyarat utama bagi pelebagaan sistem demokrasi. Demokrasi yang sehat dan mapan, menurutnya, hanya dapat tercapai apabila partai politik memiliki struktur pelebagaan yang kuat, mekanisme internal yang demokratis, dan fungsi representasi yang berjalan efektif (Palka Research, 2025). Tanpa partai yang terorganisir dan fungsional, proses demokrasi akan kehilangan instrumen penting dalam menjembatani antara negara dan masyarakat. Oleh karena itu, partai politik bukan sekadar alat elektoral, tetapi juga merupakan institusi demokrasi yang menentukan arah pembangunan politik dan kualitas pemerintahan. Dengan demikian, kuat atau lemahnya demokrasi di suatu negara sangat bergantung pada kuat atau lemahnya pelebagaan partai politik itu sendiri

Dalam kaitannya dengan kemenangan elektoral, partai politik tidak hanya bertumpu pada peran fungsional dalam sistem demokrasi, tetapi juga harus membangun kapasitas internal melalui proses pelebagaan. Pelebagaan partai merujuk pada bagaimana struktur, nilai, dan mekanisme internal partai dikembangkan secara berkelanjutan agar mampu merespons dinamika politik secara efektif. Oleh karena itu, pelebagaan bukan sekadar kondisi statis pelebagaan, melainkan merupakan bagian dari strategi adaptif partai untuk menguatkan eksistensi politiknya di tengah persaingan elektoral yang kompetitif. Dalam konteks inilah, pelebagaan partai politik dapat dipahami sebagai strategi politik jangka panjang yang bersifat institusional dan kontekstual.

2.1.5 Pelembagaan Partai sebagai Strategi Elektoral.

Pelembagaan partai politik tidak hanya dipahami sebagai proses normatif dalam demokrasi, tetapi juga merupakan strategi kunci dalam memenangkan kontestasi elektoral. Dalam konteks sistem politik yang kompetitif, partai yang terlembaga memiliki keunggulan karena mampu membangun basis pendukung yang stabil, mempertahankan loyalitas pemilih, dan merancang strategi kemenangan secara lebih terstruktur. Oleh karena itu, pelembagaan partai perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis yang terintegrasi dalam upaya elektoral partai.

Partai yang berhasil melembaga akan menunjukkan kestabilan struktural dan operasional yang tinggi, seperti konsistensi dalam rekrutmen kader, disiplin organisasi, dan keberlanjutan program politik. Stabilitas ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan publik, terutama di tengah kondisi politik yang cenderung fluktuatif. Dengan struktur internal yang tertata, partai lebih siap mengelola konflik, memobilisasi sumber daya, dan menyusun strategi kampanye yang efektif dan responsif terhadap dinamika pemilih.

Menurut Huntington (dalam Fahrezi & Rohman, 2023), pelembagaan yang kuat memperkuat legitimasi partai sebagai aktor politik. Legitimasi ini menciptakan persepsi publik bahwa partai bukan sekadar kendaraan kekuasaan sesaat, tetapi entitas politik yang dapat diandalkan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, pelembagaan berkontribusi dalam membangun kredibilitas elektoral, yang menjadi prasyarat utama dalam menarik dukungan pemilih rasional maupun emosional.

Dalam arena pemilu, pelebagaan juga membantu partai mengatasi tantangan volatilitas elektoral. Tingkat peralihan suara yang tinggi antar pemilu sering kali mencerminkan lemahnya institusionalisasi partai (Nasir, 2016). Partai yang tidak melembaga cenderung kehilangan konsistensi basis pemilih karena tidak mampu mempertahankan hubungan emosional, ideologis, maupun programatik dengan konstituen. Sebaliknya, partai yang memiliki identitas politik yang jelas dan akar sosial yang kuat akan lebih tahan terhadap guncangan politik dan lebih mampu menjaga kesinambungan dukungan elektoral.

Pelembagaan juga memungkinkan partai mengembangkan strategi jangka panjang yang tidak hanya berorientasi pada kemenangan sesaat, melainkan pada pembangunan struktur representasi politik yang berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan identitas ideologis, pembinaan kader dari tingkat bawah, dan penyusunan kebijakan partai yang berbasis kebutuhan konstituen. Dengan begitu, strategi elektoral partai menjadi tidak semata-mata berbasis kalkulasi jangka pendek, tetapi terhubung dengan visi ideologis dan fondasi pelebagaan yang solid.

Di tengah realitas politik Indonesia yang masih menghadapi problem fragmentasi elite, patronase politik, dan dominasi figur sentral, pelebagaan menjadi langkah korektif sekaligus strategis. Ia menata arah partai agar tidak bergantung pada popularitas personal atau transaksi pragmatis, melainkan bertumpu pada nilai, struktur, dan mekanisme kerja institusional. Dengan kata lain, pelebagaan menjembatani antara fungsi internal partai dengan tujuan eksternal berupa kemenangan elektoral yang legitimate dan berkelanjutan.

2.2 Strategi Pelembagaan Partai Politik

Strategi pelembagaan partai politik bertujuan untuk memperkuat posisi partai sebagai institusi yang stabil dan berpengaruh dalam sistem demokrasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya transformasi organisasi partai dari sekadar kendaraan elektoral menjadi lembaga politik yang fungsional, adaptif, dan berkelanjutan. Pelembagaan tidak hanya mencakup dimensi struktural seperti pembangunan jaringan organisasi hingga tingkat akar rumput, tetapi juga aspek kultural seperti internalisasi nilai dan ideologi partai.

Sebagaimana dijelaskan oleh Randall dan Svåsand (2002), upaya pelembagaan idealnya menysasar integrasi sistem internal yang stabil, ideologisasi yang mendalam, kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta pencitraan publik yang kredibel. Oleh karena itu, strategi yang efektif harus memadukan penguatan struktur organisasi, kaderisasi yang konsisten, pendidikan politik ideologis, serta pembangunan citra publik yang profesional. Dengan strategi ini, partai diharapkan tidak hanya mampu bersaing dalam kontestasi elektoral, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam konsolidasi demokrasi.

2.2.1 Konsep Pelembagaan Partai

Struktur pelembagaan partai politik merujuk pada sistem organisasi internal partai, yang mencakup pembagian wewenang vertikal dari tingkat pusat hingga daerah, mekanisme pengambilan keputusan, serta pengaturan fungsi antarorgan di dalam partai. Struktur ini menjadi fondasi operasional yang menentukan bagaimana partai menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dalam arena politik. Sebuah struktur yang terlembaga dengan baik memungkinkan koordinasi antarlembaga

berjalan lancar, mendorong partisipasi kader di semua tingkatan, dan memfasilitasi adaptasi organisasi terhadap dinamika politik yang terus berubah.

Dengan demikian, struktur pelebagaan yang demokratis, fungsional, dan terdesentralisasi akan mendorong partai politik beroperasi lebih responsif terhadap kebutuhan konstituen, memperkuat pelebagaan partai, serta meningkatkan daya tahan organisasi dalam menghadapi kontestasi politik secara berkelanjutan.

Pelebagaan partai politik (*party institutionalization*) merupakan proses penting yang mencerminkan sejauh mana partai politik menjadi entitas yang stabil, dapat dipercaya, dan berfungsi secara efektif dalam sistem politik. Pelebagaan ini berkaitan erat dengan konsistensi perilaku politik partai, internalisasi nilai dan norma, serta daya tahan partai terhadap perubahan situasi politik. Terdapat beberapa perspektif akademik yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep pelebagaan partai secara lebih komprehensif.

Randall dan Svåsand (dalam Fahrezi & Rohman, 2023), mengemukakan bahwa pelebagaan partai dapat ditinjau dari dua aspek besar: internal dan eksternal, yang masing-masing terdiri dari dua indikator:

- a. *Systemness* (Tingkat organisasi internal): menggambarkan tingkat integrasi dan rutinitas dalam struktur dan proses internal partai. Termasuk di dalamnya adalah konsistensi AD/ART, kejelasan struktur pengambilan keputusan, serta profesionalisme kaderisasi.
- b. *Value Infusion* (Infusi nilai): merujuk pada sejauh mana partai mampu membangun loyalitas ideologis dari para anggotanya, bukan hanya berbasis kepentingan pragmatis.

- c. *Decisional Autonomy* (Otonomi keputusan): partai yang telah terlembaga kuat memiliki kemandirian dalam merumuskan kebijakan tanpa intervensi aktor eksternal, baik dari elite politik, pemilik modal, maupun tokoh populis.
- d. *Reification* (Reifikasi): menunjukkan sejauh mana partai diterima dan diakui sebagai institusi publik yang sah oleh masyarakat dan aktor politik lain.

Empat indikator ini digunakan untuk menilai kekokohan institusionalisasi sebuah partai dalam konteks demokrasi yang dinamis. Partai yang memiliki tingkat pelembagaan tinggi biasanya menunjukkan kestabilan perilaku pemilih dan memiliki posisi strategis dalam sistem kepartaian.

Mainwaring (dalam Nasir, 2016) menegaskan bahwa sistem partai yang terlembaga ditandai oleh rendahnya *electoral volatility* atau volatilitas pemilih. Artinya, pemilih cenderung loyal dan konsisten dalam mendukung partai tertentu dari waktu ke waktu. Ketika pelembagaan rendah, volatilitas meningkat, dan sistem partai menjadi rentan terhadap fragmentasi dan pergeseran kekuasaan yang drastis. Ini menunjukkan bahwa institusionalisasi partai berkorelasi erat dengan konsolidasi demokrasi yang stabil dan berkelanjutan.

Menurut Khosnol dan Muwahid (Khotimah & Muwahid, 2022), pelembagaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari pelembagaan demokrasi itu sendiri. Partai yang baik dan fungsional akan memperkuat demokrasi melalui empat fungsi utama:

- a. Komunikasi politik
- b. Sosialisasi politik

- c. Rekrutmen politik
- d. Manajemen konflik

Namun, realitas politik menunjukkan bahwa banyak partai belum mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal. Masalah seperti krisis keuangan partai, rendahnya integritas dalam rekrutmen, serta beban biaya politik yang tinggi sering kali merusak upaya pelebagaan. Oleh karena itu, pelebagaan tidak hanya dimaknai sebagai struktur formal, tetapi juga sebagai proses budaya dan normatif dalam membangun kepercayaan publik.

Saputri (2021) menyatakan bahwa pelebagaan partai juga menghadapi tantangan besar ketika partai terlalu bergantung pada figur tertentu atau masih menunjukkan karakteristik personalistik. Dalam kondisi seperti ini, indikator seperti otonomi kebijakan dan reifikasi sering kali melemah karena partai kehilangan independensinya dalam mengambil keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa pelebagaan bukan hanya soal struktur formal, tetapi juga bagaimana partai membangun identitas yang mandiri dan berkelanjutan secara jangka panjang.

2.2.2 Struktur Organisasi sebagai Strategi Pelebagaan

Struktur organisasi merupakan salah satu variabel fundamental dalam pelebagaan partai politik. Dalam kerangka pelebagaan organisasi menurut Milton J. Esman (dalam *Pelebagaan Organisasi*, R. Slamet Santoso), struktur internal menjadi elemen penting yang memastikan bekerjanya lembaga serta pemeliharaannya secara berkelanjutan. Struktur ini mencakup pembagian peran,

pola wewenang, sistem komunikasi internal, dan komitmen terhadap nilai serta program yang diusung organisasi.

Dalam konteks partai politik, struktur organisasi yang terlembaga tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga strategis. Struktur yang mapan memungkinkan partai menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara efektif, seperti rekrutmen kader, pengambilan keputusan, pengelolaan konflik internal, dan mobilisasi elektoral. Dengan kata lain, struktur bukan hanya bentuk formal, melainkan sistem kerja kolektif yang menjaga konsistensi operasional dan arah ideologis partai dari pusat hingga akar rumput.

Randall dan Svåsand (dalam Fahrezi & Rohman, 2023), menjelaskan bahwa salah satu indikator pelembagaan partai adalah *systemness*, yakni derajat kestabilan dan integrasi sistem internal partai. Struktur organisasi menjadi sarana utama bagi pencapaian *systemness* tersebut. Ketika struktur partai bersifat hierarkis namun fungsional dengan prosedur rekrutmen, pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya yang terstandarisasi partai akan lebih mampu menghadapi dinamika politik dengan cara yang terkoordinasi dan profesional.

Pelembagaan melalui struktur juga berkaitan erat dengan proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Ketika struktur organisasi mendukung alur kaderisasi yang meritokratis, partai memiliki peluang lebih besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang berintegritas dan kapabel. Hal ini sekaligus memperkuat *value infusion* dalam tubuh partai, yaitu proses penanaman nilai dan ideologi yang menjadi landasan loyalitas politik kader dan simpatisan.

Selain itu, struktur yang jelas juga berperan dalam memperkuat otonomi partai (*decisional autonomy*), sebab sistem pelebagaan yang terdesentralisasi akan meminimalisasi dominasi elite tunggal dan membuka ruang deliberasi internal yang lebih demokratis. Dengan demikian, struktur organisasi partai bukan hanya mencerminkan stabilitas, tetapi juga menjadi mekanisme kontrol yang menjamin akuntabilitas dan responsivitas partai terhadap konstituen.

Dalam strategi pelebagaan partai, struktur menjadi basis teknis dan normatif. Ia memfasilitasi integrasi doktrin, program, dan sumber daya ke dalam praktik organisasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya membangun dan memperkuat struktur organisasi bukanlah tugas teknis semata, melainkan langkah strategis yang menentukan keberhasilan partai dalam pelebagaan jangka panjang maupun dalam kontestasi elektoral.

2.2.3 Kaderisasi Politik sebagai Strategi Pelebagaan

Kaderisasi politik merupakan strategi sentral dalam proses pelebagaan partai karena ia menyangkut regenerasi kepemimpinan, reproduksi nilai ideologis, dan penguatan basis internal partai dalam jangka panjang. Tanpa proses kaderisasi yang terstruktur, partai politik akan kesulitan mempertahankan keberlangsungan organisasi maupun kapasitas elektoralnya. Oleh sebab itu, pelebagaan tidak hanya soal struktur, tetapi juga bagaimana partai mengembangkan sumber daya manusianya secara berkelanjutan.

Menurut *Fahrezi & Rohman (2023)*, kaderisasi yang terencana berkontribusi besar dalam menciptakan struktur partai yang hidup dan dinamis. Melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan mekanisme perekrutan

yang meritokratis, partai tidak hanya mencetak calon legislatif atau eksekutif, tetapi juga membangun aktor-aktor politik yang memahami ideologi partai, loyal terhadap organisasi, dan mampu menjalankan fungsi representasi secara efektif.

Kaderisasi juga menjadi ruang internalisasi nilai-nilai partai dan ideologi secara intensif. Proses ini menanamkan integritas, etika politik, dan visi jangka panjang yang dibutuhkan dalam sistem demokrasi yang stabil. Di sinilah kaderisasi berbeda dari rekrutmen biasa; ia bersifat jangka panjang dan transformatif. Seperti ditegaskan oleh Hadi dan Gandryani (2022), kaderisasi adalah proses mendidik kader agar memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan moral untuk menjawab tantangan sosial-politik yang dihadapi partai maupun masyarakat.

Dalam praktiknya, kaderisasi politik dilakukan melalui berbagai model: diklat partai, pelatihan kader muda, sekolah politik, mentoring oleh senior partai, hingga proses magang politik di lingkungan legislatif dan eksekutif. Kegiatan-kegiatan ini menjadi saluran untuk meningkatkan kualitas SDM partai dan memastikan kontinuitas nilai-nilai organisasi. Di sisi lain, proses ini juga harus terbebas dari patronase dan politik uang, agar kader yang muncul benar-benar lahir dari proses ideologisasi, bukan karena kedekatan pribadi atau kekuatan finansial.

Kelemahan kaderisasi akan berdampak langsung terhadap kinerja partai dalam jangka panjang. Seperti dicatat dalam Hadi dan Gandryani (Hadi & Gandryani, 2022), banyak partai di Indonesia belum memiliki sistem kaderisasi yang baku dan berjenjang. Akibatnya, rekrutmen cenderung pragmatis, elite-sentris, dan tidak mencerminkan kapasitas kader. Hal ini turut memperlemah

pelembagaan karena kader tidak memiliki sense of belonging maupun kompetensi substantif dalam menjalankan fungsi politik.

Oleh karena itu, strategi pelembagaan melalui kaderisasi tidak bisa dipandang sebagai kegiatan tambahan, tetapi sebagai fondasi utama dalam pembangunan partai politik modern. Partai yang memiliki sistem kaderisasi kuat cenderung lebih stabil secara internal, lebih adaptif terhadap perubahan, dan lebih dipercaya oleh publik sebagai organisasi yang serius dalam membangun demokrasi.

2.3 Strategi Politik dan Dinamika Elektoral

2.3.1 Konsep Strategi Politik

Strategi politik merupakan elemen fundamental dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas politik, baik oleh partai politik maupun individu kandidat. Secara konseptual, strategi politik diartikan sebagai rencana menyeluruh yang disusun secara sistematis oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam konteks kontestasi pemilihan umum maupun pengaruh kebijakan. Schroder (dalam Gunawan dkk., 2020) mendefinisikan strategi politik sebagai kerangka langkah atau rencana yang terstruktur dan diarahkan pada perwujudan cita-cita politik melalui tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Dalam hal ini, strategi tidak hanya mencakup aspek perencanaan abstrak, tetapi juga melibatkan taktik-taktik praktis yang dapat dioperasikan dalam realitas politik.

Menurut Schroder (dalam Gunawan dkk., 2020), sebagai suatu pendekatan multidimensional, strategi politik melibatkan beberapa komponen utama, antara lain: (1) penentuan sasaran politik, baik berupa segmen pemilih maupun aktor kunci yang dapat memengaruhi opini publik; (2) perumusan pesan politik yang relevan,

komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan atau harapan konstituen; (3) penyusunan jadwal kegiatan dan kampanye secara teratur dan berjenjang; serta (4) pengelolaan sumber daya secara efisien, termasuk sumber daya manusia, logistik, keuangan, dan jaringan sosial. Tanpa kejelasan strategi, langkah-langkah politik yang dilakukan akan bersifat sporadis dan tidak terarah, sehingga memperkecil peluang untuk mencapai target elektoral atau memengaruhi kebijakan publik secara signifikan.

Menurut Schroder (dalam Gunawan dkk., 2020), dalam praktiknya, strategi politik dapat dibedakan ke dalam dua bentuk besar, yaitu strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif bersifat proaktif, biasanya mencakup upaya memperluas basis dukungan dengan cara membentuk opini publik melalui media, menyasar kantong suara lawan, atau menawarkan program-program baru yang inovatif untuk menarik pemilih swing. Sebaliknya, strategi defensif lebih menekankan pada mempertahankan dukungan yang sudah ada, seperti menjaga loyalitas basis pemilih tradisional, membendung isu negatif dari lawan, atau mempertahankan citra kandidat atau partai. Dalam banyak kasus, kedua strategi ini dijalankan secara bersamaan secara adaptif tergantung konteks lokal dan dinamika kompetisi politik yang dihadapi.

Dengan demikian, strategi politik merupakan kombinasi antara perencanaan jangka panjang (*planning*), pelaksanaan taktis di lapangan (*campaigning*), dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan politik (*adaptation*). Ketiganya saling berkelindan dan dirancang untuk satu tujuan utama: memenangkan kontestasi politik atau memperkuat posisi dalam sistem kekuasaan. Oleh karena itu, pemahaman atas strategi politik menjadi kunci untuk menelaah

dinamika elektoral, termasuk dalam konteks penelitian ini yang mengkaji keberhasilan Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Ciamis.

2.3.2 Pendekatan Strategi Politik di Tingkat Lokal

Pendekatan strategi politik di tingkat lokal memiliki kekhasan tersendiri karena harus disesuaikan dengan dinamika politik daerah, karakter sosial budaya masyarakat, serta konfigurasi kekuasaan yang spesifik di wilayah tersebut. Berbeda dengan strategi nasional yang cenderung bersifat makro dan berbasis isu nasional, strategi lokal menuntut kepekaan terhadap konteks mikro, seperti jaringan patronase lokal, keberadaan tokoh masyarakat, nilai-nilai budaya, hingga isu-isu spesifik yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, aktor politik, baik partai maupun kandidat, perlu merancang pendekatan berbasis akar rumput (*grassroots strategy*) agar strategi yang diterapkan bersifat partisipatif dan kontekstual. Menurut Tinov dan Handoko (2016), strategi politik lokal yang efektif umumnya mencakup: (1) pemetaan kekuatan politik daerah, termasuk identifikasi tokoh informal yang berpengaruh; (2) perencanaan taktis berdasarkan realitas sosial setempat; (3) pengelolaan sumber daya lokal seperti relawan, simpatisan, serta logistik kampanye; dan (4) penggunaan pendekatan budaya dalam komunikasi politik, misalnya dengan melibatkan lembaga adat atau tokoh agama sebagai jembatan dengan masyarakat lokal.

Dalam praktiknya, strategi ini tidak hanya dijalankan dengan metode kampanye konvensional, tetapi juga melalui pencitraan kandidat yang diselaraskan dengan identitas lokal. Kandidat yang mampu menyesuaikan gaya komunikasi dan penampilan dengan nilai-nilai masyarakat, misalnya menggunakan simbol-simbol

lokal atau mengangkat isu agraria dan keagamaan, cenderung lebih mudah diterima pemilih. Studi kasus oleh Andries dkk. (2023) dalam Pilkada Halmahera Utara tahun 2020 menunjukkan bahwa kemenangan pasangan petahana tidak semata-mata karena intensitas kampanye, tetapi lebih ditentukan oleh modal sosial lokal yang mereka miliki, seperti kedekatan dengan tokoh adat, keberadaan tim sukses yang loyal, serta kemampuan menjaga hubungan personal dengan konstituen melalui pelayanan publik konkret dan sentuhan emosional. Penelitian serupa oleh Yuliani dan Ardianto (2020) juga menegaskan bahwa keberhasilan strategi politik di tingkat lokal bergantung pada koherensi antara kultur sosial masyarakat dan kapital politik kandidat, seperti popularitas, reputasi, serta kedekatan genealogis dengan komunitas pemilih.

Dengan demikian, pendekatan strategi politik lokal menuntut fleksibilitas tinggi dan kepekaan terhadap realitas sosial daerah. Partai politik dan kandidat harus mampu membaca lanskap politik lokal secara jernih, lalu menyesuaikan strategi komunikasi, pesan politik, saluran mobilisasi, hingga jaringan relawan dengan kondisi konkret pemilih. Meskipun berada dalam kerangka besar strategi partai nasional, keberhasilan elektoral di daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana strategi lokal mampu menjahit kepentingan nasional dengan aspirasi komunitas lokal secara harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan semacam ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis strategi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kabupaten Ciamis, khususnya pada Dapil 1 dan Dapil 3, di mana konteks budaya, religiusitas, dan jaringan masyarakat berperan besar dalam menentukan arah dukungan pemilih.

2.3.3 Peran Struktur Partai dalam Pemenangan Elektoral

Struktur organisasi partai politik merupakan elemen fundamental dalam memenangkan kontestasi elektoral, terutama di tingkat lokal. Struktur yang solid dan menjangkau hingga level akar rumput memungkinkan partai menjalankan fungsi mobilisasi politik secara efektif, termasuk dalam hal penggalangan suara, pendistribusian logistik kampanye, perekrutan saksi TPS, hingga pengawasan suara saat pemilu berlangsung. Partai yang memiliki jaringan kepengurusan aktif dan terorganisir hingga ke tingkat desa/kelurahan umumnya lebih mampu mengidentifikasi potensi dukungan, menjalin komunikasi intensif dengan pemilih, dan menyesuaikan strategi kampanye dengan kondisi sosial setempat. Hal ini menjadi faktor pembeda yang signifikan antara partai yang sukses dalam pemilu dan yang tidak.

Penelitian oleh Tinov dan Handoko (2016) menunjukkan bahwa kegagalan banyak partai dalam pemilihan lokal sering kali disebabkan oleh lemahnya struktur organisasi, khususnya di tingkat bawah. Tidak sedikit partai yang hanya aktif di level pusat dan kabupaten/kota, tanpa memiliki perangkat nyata di tingkat kecamatan atau desa. Akibatnya, akses terhadap pemilih menjadi terbatas dan strategi kampanye tidak tersampaikan secara maksimal di lapangan. Struktur partai yang tidak merata juga berdampak pada minimnya pengawasan internal, lemahnya disiplin kader, dan terhambatnya koordinasi dalam masa kampanye. Sebaliknya, partai dengan jaringan struktur yang mapan hingga tingkat bawah memiliki keunggulan kompetitif dalam menggerakkan kader, memperluas daya jangkau,

serta menjamin konsistensi implementasi strategi partai di berbagai wilayah (Tinov & Handoko, 2016).

Studi kasus dari Pilkada Halmahera Utara tahun 2020 oleh Andries dkk. (2023) memperkuat argumen ini. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kemenangan petahana sangat bergantung pada kekuatan tim sukses yang terdiri atas gabungan struktur formal partai dan relawan lokal. Tim ini tidak hanya aktif dalam kegiatan kampanye, tetapi juga mampu menjalin kedekatan sosial dengan pemilih melalui kegiatan pelayanan publik dan distribusi bantuan selama pandemi COVID-19. Keberadaan struktur yang rapi dan kader militan memungkinkan penyampaian pesan politik secara lebih personal, efektif, dan tepat sasaran.

Struktur internal partai juga memainkan peran penting dalam menjaga diseminasi instruksi politik dari pusat ke daerah secara konsisten. Instruksi mengenai strategi kampanye, isu yang diangkat, serta pelaksanaan kegiatan kampanye dapat berjalan lebih efektif ketika struktur partai tersusun baik dan memiliki rantai komando yang jelas. Dalam konteks kemenangan legislatif, struktur partai menjadi tulang punggung operasional yang menjamin bahwa setiap daerah pemilihan (dapil) memiliki tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengamankan suara, melakukan *canvassing*, dan meminimalisasi kehilangan suara akibat kesalahan teknis atau lemahnya pengawasan.

2.4 Teori Pelembagaan Partai Politik

Pelembagaan partai politik merupakan proses penting dalam menilai sejauh mana sebuah partai dapat bertahan, berkembang, dan menjalankan fungsinya secara konsisten dalam sistem demokrasi. Dalam konteks negara demokrasi baru seperti

Indonesia, teori pelebagaan partai yang dirumuskan oleh Randall dan Svåsand (2002) menjadi acuan utama untuk memahami bagaimana partai politik menjadi institusi yang mapan dan diterima secara luas oleh masyarakat maupun aktor politik lainnya.

Menurut Randall dan Svåsand (Randall & Svåsand, 1993)v, pelebagaan partai bukanlah sekadar pembentukan struktur formal, tetapi mencakup pembentukan pola perilaku, nilai, dan stabilitas dalam jangka panjang. Mereka membagi pelebagaan partai ke dalam dua dimensi utama, yakni:

a. Aspek Internal

Berkaitan dengan bagaimana struktur, nilai, dan norma organisasi partai tertanam dalam diri para anggotanya. Dimensi ini menekankan pada konsistensi organisasi, keberlanjutan aturan internal, dan proses kaderisasi.

b. Aspek Eksternal

Menunjukkan sejauh mana partai politik memperoleh pengakuan dari masyarakat luas sebagai institusi publik yang sah. Ini meliputi legitimasi publik dan kemandirian dalam pengambilan keputusan.

Dari dua dimensi tersebut, Randall dan Svåsand mengembangkan empat indikator pelebagaan partai:

a. *Systemness*

Merujuk pada stabilitas struktur organisasi partai dan keberlanjutan proses internalnya. Partai yang terlebaga memiliki sistem administrasi yang jelas, mekanisme rekrutmen yang tertata, serta koordinasi

antarorganisasi yang berjalan konsisten. Pelembagaan dalam aspek ini tampak pada eksistensi cabang hingga tingkat lokal, kepatuhan terhadap AD/ART, dan kemampuan mengelola konflik internal secara institusional.

b. *Value Infusion*

Menggambarkan seberapa dalam nilai, ideologi, dan visi partai diinternalisasi oleh para anggotanya. Bukan hanya mengikuti partai karena faktor elektoral atau pragmatisme, anggota dan simpatisan menghayati perjuangan partai sebagai bagian dari keyakinan politik jangka panjang. Partai yang memiliki infusi nilai yang kuat cenderung lebih loyal dan memiliki daya tahan tinggi terhadap tekanan eksternal maupun godaan elektoral jangka pendek.

c. *Decisional Autonomy*

Menunjukkan kemandirian partai dalam mengambil keputusan politik, tanpa intervensi dari aktor eksternal seperti elite dominan, pemodal, atau figur sentralistik. Tingkat otonomi yang tinggi memungkinkan partai untuk bertindak strategis sesuai dengan ideologi dan kepentingan organisasinya, bukan hanya mengikuti arahan figur populis atau kepentingan donor politik.

d. *Reification*

Mengacu pada legitimasi simbolik partai di mata publik. Reifikasi tercapai ketika partai tidak hanya menjadi peserta pemilu, tetapi benar-benar hadir sebagai institusi yang dipercaya, dikenal, dan dipersepsikan publik sebagai representasi politik yang sah. Aspek ini mencerminkan bagaimana

citra partai dibentuk melalui kehadiran simbolik, kepercayaan publik, dan konsistensi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

Keempat indikator ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam proses institusionalisasi partai. Apabila keempat indikator tersebut tercapai, maka sebuah partai akan memiliki daya tahan tinggi, minim konflik internal, serta stabil dalam memperoleh dukungan elektoral.

Dalam konteks demokrasi baru, seperti Indonesia, pelembagaan partai menjadi tantangan tersendiri. Sebagaimana diungkapkan dalam artikel Fahrezi dan Rohman (2023), banyak partai politik di Indonesia belum mencapai pelembagaan yang ideal. Bahkan pada partai-partai yang tampak aktif secara elektoral, kerap kali struktur internal masih lemah, nilai ideologis tidak terinternalisasi, dan keputusan partai masih dipengaruhi oleh kepentingan eksternal, seperti elite nasional atau pemilik modal.

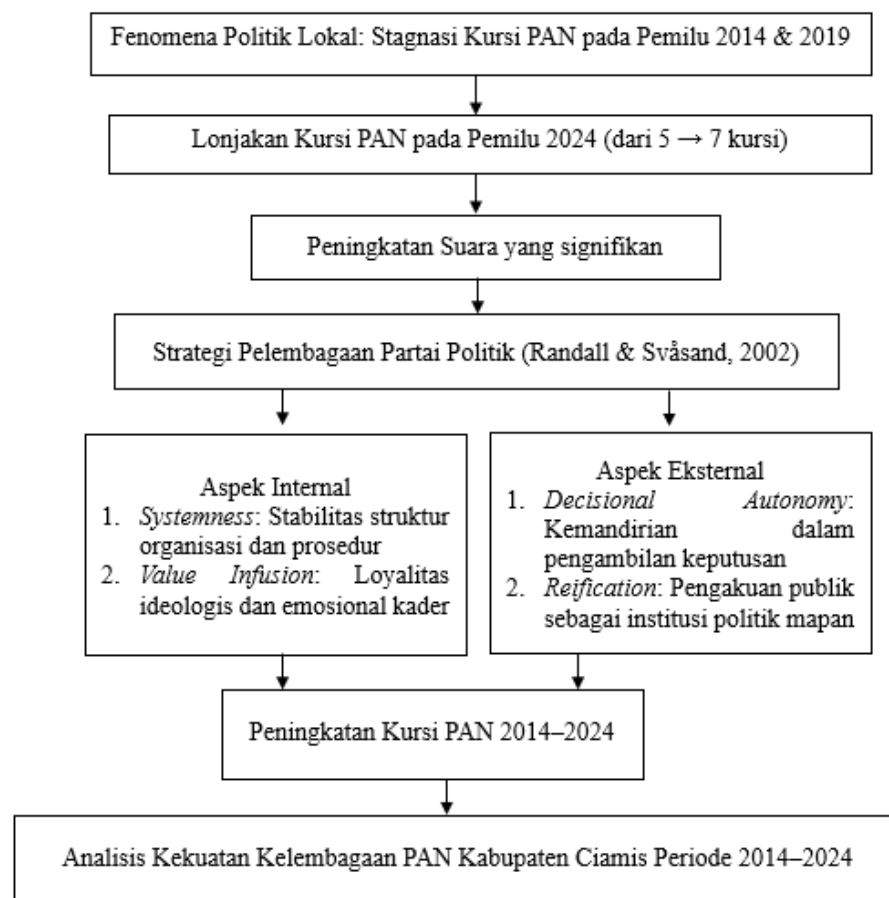
Implikasinya adalah tingginya **electoral volatility** atau ketidakstabilan suara antar pemilu, yang mencerminkan lemahnya hubungan jangka panjang antara partai dan konstituen. Hal ini ditegaskan pula oleh Mainwaring (dalam Nasir, 2016) yang menyatakan bahwa partai yang tidak terlembaga cenderung gagal dalam menciptakan sistem kepartaian yang stabil dan demokratis.

Dengan demikian, teori Randall dan Svåsand menawarkan kerangka analisis yang sangat penting dalam memahami keberhasilan maupun kegagalan partai dalam mengokohkan dirinya sebagai institusi politik. Pelembagaan bukan hanya menyangkut aspek teknis organisasi, tetapi juga menyentuh dimensi nilai,

legitimasi, dan kemandirian yang menjadi kunci keberlanjutan partai dalam sistem demokrasi yang dinamis.

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2009), kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif merupakan landasan konseptual yang menjelaskan hubungan antara konsep atau fenomena yang diteliti secara logis dan sistematis. Untuk mempermudah penulis dalam rangka menyusun juga menjelaskan maksud dan tujuan penelitian ini, maka perlu diperlukan suatu kerangka berpikir yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir